
**PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: TANTANGAN BAGI
PENELITI DAN PRAKTISI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Abu Huraerah

Program Studi Ilmu
Kesejahteraan Sosial, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pasundan

Article history

Received: 23 Desember 2025

Revised : 22 Januari 2025

Accepted: 25 Januari 2025

*Corresponding author

Email : huraerah_ks@unpas.ac.id

No. doi: [10.24198/focus.v7i2.60229](https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60229)

ABSTRAK

Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma, nilai-nilai, dan berbagai pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Perubahan sosial menyentuh berbagai bidang, baik politik, ekonomi, dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perubahan politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia dan implikasinya terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, serta tantangannya bagi peneliti dan praktisi kesejahteraan sosial. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bidang politik, terjadi perubahan dari kekuasaan yang lebih bersifat otoriter ke arah kekuasaan yang lebih demokratis dan transparan, serta dari kekuasaan yang sentralistis ke arah kekuasaan yang desentralistis. Bidang ekonomi, sebagai hasil pembangunan ekonomi selama beberapa periode pemerintahan adalah terciptanya usaha-usaha ekonomi dalam skala besar. Dalam beberapa macam produk, usaha-usaha skala besar ini telah mengalahkan ekonomi rakyat yang beskala kecil. Bidang budaya, perubahan pada nilai-nilai individualisme dan persaingan cenderung mulai mengatasi nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama. Nilai-nilai kebebasan individu cenderung mengalahkan nilai-nilai pengawasan sosial. Implikasi dari perubahan-perubahan tersebut adalah peranan pemerintah pusat dalam pembangunan kesejahteraan sosial tidak dapat lagi dominan. Dengan otonomi daerah, peranan pemerintah daerah yang lebih dominan. Tantangan bagi para peneliti adalah melakukan penelitian lebih mendalam tentang perubahan sosial yang terjadi, faktor-faktor utama yang menyebabkan perubahan sosial, dan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan sosial tersebut. Sementara, tantangan bagi praktisi kesejahteraan sosial memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian, serta menyusun dan melaksanakan program yang tepat.

Kata kunci: Perubahan Sosial, Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Peneliti Dan Praktisi Kesejahteraan Sosial

ABSTRACT

Social change occurs in society about thought patterns, social attitudes, norms, values, and various patterns of human behavior. Social change touches multiple fields, including politics, economics, and culture. This research aims to describe political, economic, and cultural changes in Indonesia and their implications for social welfare development, as well as the challenges for social welfare researchers and practitioners. This research method uses literature

studies from scientific journals and books. The results of the research show that in the political sector, there has been a change from more authoritarian power towards more democratic and transparent power, as well as from centralized power towards decentralized power. In the economic sector, as a result of economic development during several periods of government, the creation of large-scale economic businesses. In several types of products, these large-scale businesses have defeated the small-scale people's economy. In the cultural sector, changes to the values of individualism and competition tend to begin to overcome the values of togetherness and cooperation. The values of individual freedom tend to trump the values of social control. These changes imply that the role of the central government in developing social welfare can no longer be dominant. With regional autonomy, the role of regional government is more dominant. The challenge for researchers is to conduct more in-depth research on the social changes that occur, the main factors that cause social changes, and the impacts caused by these social changes. Meanwhile, the challenge for social welfare practitioners is to utilize and apply research results, as well as develop and implement appropriate programs.

Key word: social change, social welfare development, social welfare researchers and practitioners

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (pasal 1 ayat (1) Undang-undang Tentang Kesejahteraan Sosial). Definisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan. Selaras dengan definisi tersebut, penulis setuju dengan definisi kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Midgley. Kesejahteraan sosial oleh Midgley (1997) didefinisikan sebagai "... a state or condition of human well-being that exists when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized." (cetak miring asli dari buku). Walaupun tidak prinsipal, bagi penulis, pemenuhan kebutuhan manusia menempati urutan pertama.

Definisi kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, karena kata kesejahteraan memang menunjukkan

keadaan sejahtera. Selain itu, pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan sejahtera lebih dekat maknanya dengan yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu "... dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ..." (dalam pembukaan) dan bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial. Bab XIV kesejahteraan sosial memuat dua pasal, yaitu pasal 33 dan 34. Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sementara, pasal 34 fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ketiga ayat dalam pasal 33 bab XIV tersebut berkaitan dengan kesejahteraan sosial dalam arti sebagai suatu keadaan sejahtera. Selama ini yang sering dikutip dan dijadikan salah satu landasan hukum dari bab XIV ini hanyalah

pasal 34 saja. Hal yang lebih penting adalah pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan dapat dijadikan tujuan bagi usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial, karena mengandung unsur yang dapat diukur, yaitu terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan manusia, baik sebagai individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Perubahan sosial secara konseptual adalah perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Dengan demikian perubahan yang dimaksud adalah perubahan tidak hanya terkait aspek sosial semata namun juga terkait dengan aspek budaya, karena memang manusia selain sebagai makhluk sosial juga tidak terlepas dari kebudayaan (Prayogi & Prasetya, 2023). Secara luas, konsep perubahan sosial merupakan suatu konsep yang memiliki dimensi yang sangat luas. Hal ini dapat dilihat dari beragam pendapat ahli yang memberikan pemahaman yang berbeda satu sama lainnya terkait perubahan sosial (Prayogi, 2023). Wilbert More misalnya, memaknai perubahan sosial sebagai suatu perubahan penting yang terjadi dalam keseluruhan aspek sosial seperti struktur, pola perilaku dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural (Prayogi, 2023). Soemardjan memaknai perubahan sosial sebagai suatu perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya yang di dalamnya mencakup pula nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku (Soekanto, 1992). Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, perubahan sosial dapat pula dipahami sebagai suatu kajian yang mempelajari berbagai perilaku interaksi manusia yang terkait dengan perubahan. Dengan demikian, maka titik tekan dalam telaah dari perubahan sosial ialah keseluruhan aspek kehidupan manusia di dalam masyarakat atau meliputi

keseluruhan fenomena sosial (Suyanto & Narwoko, 2004).

Perubahan sosial dapat bergerak menuju kemajuan, dalam hal ini masyarakat berkembang. Di sisi lain, perubahan sosial juga dapat menimbulkan kemunduran dalam kehidupan masyarakat (Astuti, Al-Jannah, Amin, & Mukhlisuddin, 2023). Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru (berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya). Perubahan sosial mencakup perubahan dalam nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, susunan lembaga kemasyarakatan, pelapisan sosial, kelompok sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, kekuasaan dan wewenang, serta berbagai segi kehidupan masyarakat lainnya. Beberapa sistem perubahan menciptakan kebutuhan perubahan sosial di suatu masyarakat muslim biasanya ditunjukkan dengan berkembangnya peradaban di masyarakat muslim tersebut. Jadi, dapat diambil konklusi bahwa substansi perubahan sosial tersebut adalah munculnya peradaban Islam yang kuat (Mandasari, Ma'rif, & Amin, 2023).

Hasil penelitian Kambey, Maramis, & Masloman (2024) menunjukkan bahwa dampak perubahan sosial ekonomi meliputi pada peningkatan penguasaan teknologi di masyarakat, komunikasi masyarakat yang lebih baik, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan jiwa berwirausaha.

Ada beberapa definisi perubahan sosial, the University of the People (2010), sebuah universitas nirlaba bebas biaya kuliah yang berbasis di AS, mendefinisikan perubahan sosial adalah "cara interaksi manusia, hubungan, pola perilaku, dan norma budaya berubah seiring waktu." Setiap bagian masyarakat - termasuk perekonomian, budaya, teknologi, lingkungan hidup dan bidang politik - mengalami perubahan sosial. Para filsuf, politisi, ilmuwan dan lain-lain telah

mengembangkan teori perubahan sosial sejak zaman kuno. Di Yunani dan Roma kuno, muncul tiga gagasan utama tentang perubahan sosial, yaitu kemunduran atau degenerasi, perubahan siklus, dan kemajuan berkelanjutan (The University of the People, 2010).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan sosial dalam bentuk perubahan politik, perubahan ekonomi, dan perubahan budaya di Indonesia dan implikasinya terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, serta tantangannya bagi peneliti dan praktisi kesejahteraan sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Data dalam penelitian kajian pustaka ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur ilmiah dari jurnal-jurnal dan buku-buku terpilih.

Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan penelusuran tentang kerangka konsep perubahan sosial dan implikasinya bagi pembangunan kesejahteraan sosial, serta tantangan bagi peneliti dan praktisi kesejahteraan sosial. Data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Sosial dan Implikasinya

Perubahan-perubahan terjadi di Indonesia saat ini melingkupi pada berbagai bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Pada bidang politik, terjadi perubahan dari kekuasaan yang lebih bersifat otoriter ke arah kekuasaan yang lebih demokratis dan transparan, serta dari kekuasaan yang sentralistis ke arah kekuasaan yang desentralistis. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan Amin, Humaizi, Rahmadani, & Yusuf (2022) bahwa Indonesia, sebagai negara yang memiliki

keragaman budaya dan populasi besar, telah mengalami perubahan politik yang mencolok dalam beberapa dekade terakhir. Transisi ini telah membawa tantangan dan peluang baru bagi sistem politik negara. Dalam lanskap politik Indonesia, partai politik, lembaga legislatif, dan eksekutif memiliki peran kunci dalam menentukan arah negara dan mengarahkan kebijakan-kebijakan penting. Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, sedangkan lembaga legislatif dan eksekutif bekerja sama untuk membentuk dan mengimplementasikan kebijakan yang menggerakkan negara menuju masa depan yang lebih baik. Peran dan dinamika antara ketiga komponen ini memberikan pengaruh besar terhadap stabilitas dan kemajuan politik Indonesia.

Lebih lanjut, Amin, Humaizi, Rahmadani, & Yusuf (2022) menjelaskan bahwa pada intinya, politik adalah tentang bagaimana negara dikelola dan bagaimana kekuasaan didistribusikan. Indonesia telah melalui masa-masa transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi yang lebih inklusif. Seiring dengan perubahan tersebut, sistem politik telah mengalami transformasi yang signifikan. Demokrasi menekankan pentingnya instrumen politik dalam membentuk lembaga yang stabil dan berfungsi dengan baik. Infrastruktur dan suprastruktur politik, termasuk partai politik, memainkan peran sentral dalam memastikan kelancaran proses politik. Partai politik tidak hanya berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga sebagai kontrol dan keseimbangan terhadap lembaga eksekutif dan legislatif.

Pada bidang ekonomi, sebagai hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan selama beberapa periode pemerintahan adalah terciptanya usaha-usaha ekonomi dalam skala besar, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat multinasional. Dalam beberapa macam produk, usaha-usaha skala besar ini telah mengalahkan ekonomi rakyat yang

berskala kecil. Walaupun demikian, Pemerintah terus berupaya memajukan UKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam berbagai bidang usaha. Dewasa ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Hal tersebut telah menjadi tuntutan yang sangat besar untuk memajukan usaha-usaha ekonomi, baik skala kecil, menengah, maupun besar.

Dampak sosial dari kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya telekomunikasi, informasi yang multimedia akan sangat berpengaruh dalam perubahan tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan, dikarenakan sifat fleksibilitas dan kemampuan telematika untuk masuk ke dalam setiap aspek kehidupan manusia. Kondisi ini akan tampak pada perubahan yang terjadi pada masyarakat baik kondisi ideologi, sosial budaya, politik hingga kondisi keamanan suatu negara (Stamm dalam Yoga, 2018).

Hasil penelitian Sagita, Yuliati, & Fauzi (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, penggunaan informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM.

Teknologi informasi dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk kegiatan e-commerce yang dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar, mempromosikan usaha secara online, meningkatkan kualitas komunikasi dan jaringan sosial online, menggunakan data dari daerah lain dan membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnis baru. Hal ini yang membuat pemanfaatan teknologi informasi sangat berdampak terhadap peningkatan kinerja bisnis (Laudon & Traver, 2011).

Pada bidang budaya, nilai-nilai individualisme dan persaingan cenderung mulai mengatasi nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama. Nilai-nilai kebebasan

individu cenderung mengalahkan nilai-nilai pengawasan sosial. Perubahan nilai-nilai ini terutama terjadi di kota-kota besar. Dalam struktur keluarga, terjadi kecenderungan perubahan dari keluarga besar (extended family) ke arah keluarga kecil (nuclear family). Karena kemajuan dalam bidang kesehatan, angka harapan hidup juga mengalami peningkatan. Kemudian, karena kemudahan dalam transportasi, mobilitas pendudukpun semakin tinggi. Kecenderungannya adalah penduduk desa akan mengalir ke kota-kota besar, selain untuk melanjutkan studi bagi para pemuda, juga untuk mencari pekerjaan. Selain, perpindahan penduduk dari desa ke kota, perpindahan penduduk juga terjadi dari satu pulau ke pulau lain.

Implikasi dari perubahan-perubahan tersebut adalah bahwa peranan pemerintah pusat dalam pembangunan kesejahteraan sosial tidak dapat lagi dominan seperti pada masa lalu. Dengan otomomi daerah, maka peranan pemerintah daerah yang lebih dominan. Peranan penerima pelayanan perlu ditingkatkan, dalam arti lebih banyak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut nasib mereka, tidak boleh lagi hanya diputuskan oleh administrator atau pengelola program saja. Keseragaman program juga perlu dikurangi, kreativitas daerah dalam mengembangkan program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang sesuai bagi daerahnya perlu digalakkan.

Dengan perkembangan ekonomi berskala besar, memunculkan sistem ekonomi kapitalisme dan berbarengan dengan ini adalah terjadinya kesenjangan sosial. Pada satu sisi, terdapat segelintir orang-orang kaya-raya, dan pada sisi lain sebagian besar rakyat masih hidup dalam garis kemiskinan.

Warga masyarakat yang usaha ekonominya dikalahkan oleh usaha berskala besar, dan mereka yang tanahnya harus dilepaskan untuk keperluan pembangunan, seperti mendirikan pabrik, membuat jalan, dan sebagainya, akan

kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan mereka yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Terkait dengan hal ini, mereka perlu dilakukan usaha-usaha pembinaan dalam rangka alih pekerjaan.

Mereka yang beruntung dapat bekerja pada usaha-usaha ekonomi berskala besar akan sangat tergantung pada pekerjaan dan pengupahannya. Selain itu, perubahan dan peningkatan teknologi industri di tempat mereka bekerja dapat mengancam kelangsungan pekerjaan mereka. Hal ini bagi mereka perlu dikembangkan program-program kesejahteraan sosial yang bersifat pencegahan dan pengembangan.

Dengan meningkatnya iklim individualisme dan persaingan, maka mereka yang kalah dalam persaingan mungkin akan merasa tersisih dari masyarakat yang pada gilirannya dapat mengalami gangguan jiwa dan seterusnya akan menjadi masalah sosial. Berkurangnya pengawasan sosial akan membuat orang kurang merasa peduli lagi dengan masyarakat sekitarnya.

Kecenderungan bergesernya keluarga besar menjadi keluarga kecil, sementara angka harapan hidup semakin tinggi akan menimbulkan masalah bagi para lanjut usia. Apabila mereka sudah lanjut usia, mereka tidak lagi mengandalkan rawatan dari anak atau menantunya. Namun, nilai-nilai bangsa Indonesia masih tidak memungkinkan melepaskan orang tua untuk ditempatkan di rumah perawatan bagi lanjut usia. Dalam hal ini, pengembangan program-program bagi para lanjut usia akan menjadi tantangan.

Dengan arus urbanisasi, terjadi banyak masalah di perkotaan, seperti pengemis, gelandangan, kejahatan, anak jalanan, daerah kumuh, dan sebagainya. Selain itu, dengan semakin beragamnya suku bangsa, baik yang tinggal di kota-kota besar maupun yang tinggal di pulau-pulau lain, secara potensial dan faktual dapat menimbulkan konflik. Program-program

untuk mengatasi dan mencegah konflik sosial ini perlu dikembangkan.

Tantangan bagi Peneliti dan Praktisi Kesejahteraan Sosial

Tantangan bagi para peneliti adalah melakukan penelitian lebih mendalam tentang perubahan sosial yang terjadi, faktor-faktor utama yang menyebabkan perubahan sosial, dan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan sosial tersebut. Sementara, tantangan bagi praktisi kesejahteraan sosial memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian, serta menyusun dan melaksanakan program yang tepat.

SIMPULAN

Perubahan sosial pada bidang politik, terjadi perubahan dari kekuasaan yang lebih bersifat otoriter ke arah kekuasaan yang lebih demokratis dan transparan, serta dari kekuasaan yang sentralistis ke arah kekuasaan yang desentralistis. Bidang ekonomi, sebagai hasil pembangunan ekonomi selama beberapa periode pemerintahan adalah terciptanya usaha-usaha ekonomi dalam skala besar. Dalam beberapa macam produk, usaha-usaha skala besar ini telah mengalahkan ekonomi rakyat yang beskala kecil. Bidang budaya, perubahan pada nilai-nilai individualisme dan persaingan cenderung mulai mengatasi nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama. Nilai-nilai kebebasan individu cenderung mengalahkan nilai-nilai pengawasan sosial. Implikasi dari perubahan-perubahan tersebut adalah peranan pemerintah pusat dalam pembangunan kesejahteraan sosial tidak dapat lagi dominan. Dengan otomomi daerah, peranan pemerintah daerah yang lebih dominan. Tantangan bagi para peneliti adalah melakukan penelitian lebih mendalam tentang perubahan sosial yang terjadi, faktor-faktor utama yang menyebabkan perubahan sosial, dan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan sosial tersebut. Sementara, tantangan bagi praktisi kesejahteraan sosial memanfaatkan

dan menerapkan hasil penelitian, serta menyusun dan melaksanakan program yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Humaizi, Rahmadani, S., & Yusuf, M. (2022). Political power shift in the House of Representatives of North Sumatra Province, Indonesia: A Political Communication of Post-election. *Studies in Media and Communication*, Vol. 10, No. 2; December 2022 ISSN: 2325-8071 E-ISSN: 2325-808X Published by Redfame Publishing URL: <http://smc.redfame.com>
- Astuti, R., S., Al-Jannah, S., Amin, A., & Mukhlisuddin. (2023). Hakekat perubahan sosial. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
- Kambey, F., M., Maramis, M., T., B., & Masloman, I. (2024). Perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara sebagai dampak adanya objek wisata pantai pulisan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 24 No. 1 Januari 2024
- Laudon & Traver. (2011). *E-commerce: Business, technology, society*. Prentice Hall Higher Education
- Mandasari, R., Ma'ruf, I., Amin, A. (2023). Sistem perubahan sosial dan strategi perubahan sosial. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
- Prasetya, D., & Prayogi, A. (2022). Implikasi konvergensi media terhadap konsepsi dan peran khalayak. *ARKANA: Jurnal Komunikasi dan Media*, 1(02), 61-70
- Prayogi, A., & Prasetya, D. (2023). Humans as cultured, ethical, and aesthetic beings: A conceptual study. *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(2), 14-22
- Prayogi, A. (2023). Perubahan sosial dalam masyarakat. Dalam *Dasar Ilmu Sosiologi*. Kota Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia
- Midgley, J. (1997). *Social welfare in a global context*. Thousand Oaks, Ca.: Sage
- Sagita, N., M., M., Y., D., Yuliati, N., N., Fauzi, A., K. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan informasi akuntansi dan pelatihan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Mataram. *ALINASI. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, Vol 6 No 1 2021. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani
- Soekanto, S. (1992). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Dasar 1945
- Suyanto, B., & Narwoko, J. D. (Eds.). (2004). *Sosiologi: Teks pengantar dan terapan*. Jakarta: Kencana
- The University of the People (2010). <https://www.humanrightscareers.com/issues/social-change-101-meaning-examples-learning-opportunities/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial>
- Yoga, S. (2018). Perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia dan perkembangan teknologi komunikasi. *Jurnal Al-Bayan UIN Ar-Raniry*